

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan kedamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, termasuk di antaranya dalam segi kesehatan, dimana kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salahsatu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persolan pelayanan kesehatan diantaranya adalah dengan membuat regulasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014. Selain itu dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah mulai membuat program-program yang diarahkan kepada masyarakat kurang mampu agar semua masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat kurang mampu dengan berupa bantuan atau subsidi dana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai suatu keadilan dan merata.

Penelitian ini mencoba menyoroti tentang kebijakan pemerintah kabupaten Bondowoso terkait dengan pelayanan kesehatan yang disubsidi oleh pemerintah khususnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk masyarakat yang

kurang mampu di kabupaten Bondowoso khususnya di kecamatan Jambesari dimana Puskesmas Jambesari sebagai badan pelaksana pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Nasional karena menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Pembangunan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh aspek demografi/kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi, perkembangan lingkungan fisik, mental, serta sosial. Untuk itu keberhasilan pembangunan dalam segi kesehatan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya yaitu Pelayanan Kesehatannya.

Sebagai pelaksanaan otonomi daerah dalam aspek kesehatan, Bupati Bondowoso mengeluarkan putusan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bondowoso. Dinas Kesehatan kabupaten Bondowoso mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan dan sebagai badan koordinasi badan-badan kesehatan di daerah-daerah kecamatan yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan yang meningkat di Indonesia menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan bidang pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis subsidi pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai pelaksana otonomi daerah sehingga mendapatkan perhatian dari masyarakat yang kurang mampu agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Pelayanan publik merupakan pintu utama atau gerbang utama sebuah pelaksanaan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini fokus pembahasan penelitian ini adalah sebuah pelayanan di bidang kesehatan menyangkut persepsi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di daerah sebagai pelaksana otonomi dan desentralisasi.

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dibidang kesehatan, dimana pelayanan ini didapatkan di

pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta, Klinik, dan lain sebagainya. Akan tetapi, fokus penelitian ini bukan tentang bagaimana perawat melayani pasien, bukan juga tentang bagaimana dokter mengobati pasien yang sedang sakit. Tetapi tentang bagaimana kebijakan tatakelola pelayanan kesehatan dengan fokus subsidi itu berjalan di suatu badan pelayanan kesehatan yang pada penelitian ini ditentukan contoh pelayanan di daerah yaitu Puskesmas Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso dalam melayani Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dengan kata lain, penelitian ini disesuaikan dengan program studi yang ditempuh penulis yaitu program studi Ilmu Pemerintahan, dengan memfokuskan pada kebijakan pemerintah yang sedang berjalan, dengan kata lain bagaimana status kebijakan yang dibuat itu berjalan di tingkat daerah.

Pelayanan Kesehatan Bersubsidi ini mengacu pada Keputusan Bupati Bondowoso No. 188.45/241/430.4.2/2017 tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017. Bahwa, untuk melaksanakan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017. Dimana menurut Keputusan bupati tersebut, untuk jasa pelayanan pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) kabupaten bondowoso Tahun 2017 sebesar 60% (Enampuluh per seratus), dan untuk jasa sarana pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 sebesar 40% (Empat puluh per seratus), dimana sarana yang dimaksud yaitu berupa obat, alat kesehatan, bahan medis pakai habis, dan reagen (pengganti pemeriksaan penunjang) dan kegiatan operasional lainnya.

Sementara itu Puskesmas Kecamatan Jambesari sebagai pelaksana kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dimana KIS sebagai pelayanan subsidi kesehatan bagi masyarakat miskin, ternyata setelah peneliti melakukan pengamatan dengan cara mengikuti kegiatan

langsung secara rutin selama satu bulan magang riset di lokasi penelitian pelayanan subsidi lama seperti JAMKESMAS dan JAMKESDA maupun BPJS masih dipergunakan untuk masyarakat miskin yang seharusnya dalam peraturan tersebut harus sudah menggunakan KIS.

Alasan penulis memilih Puskesmas Jambesari sebagai lokasi penelitian yaitu karena Kecamatan Jambesari adalah salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Bondowoso yang dimana penduduknya rata-rata menengah ke bawah dan layak untuk mendapat subsidi pemerintah di bidang kesehatan. Dan penulis ingin menguji apakah di kecamatan yang merupakan kecamatan terpencil kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi berjalan atau tidak, jika iya maka Puskesmas tersebut sudah dapat dikatakan menjadi contoh bagi puskesmas yang lain. Itu artinya, Puskesmas-puskesmas yang lain termasuk yang kecamatan lain yang penduduknya lebih berada di kelas menengah ke atas juga sudah menerapkan kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang ditulis peneliti di atas, maka penulis menentukan “Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Bersubsidi (Studi Puskesmas Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso)” sebagai judul penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Bersubsidi di Puskesmas Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Bersubsidi di Puskesmas Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi yaitu sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan subsidi pelayanan kesehatan.

### 1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan terkait Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Bersubsidi di Puskesmas Kecamatan Jambesari Kabupaten Bondowoso, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang permasalahan yang sama terkait dengan Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Bersubsidi.

### 1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis di bidang penelitian dan penulisan skripsi dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman.